

JURNAL ILMU POLITIK

Volume 22, No.1, Tahun 2017

ISSN 0854-6029

DDC: 321 : 330.95

Saiful Mujani

KONSOLIDASI DEMOKRASI ASIA: SEBUAH TES MODEL EKONOMI POLITIK

Jurnal Ilmu Politik

Volume 22, No.1 Tahun 2017, Hlm. 1-18

Asia merupakan benua di mana negara-negaranya memiliki tingkat konsolidasi dalam demokrasi yang beragam. Tulisan ini bermaksud untuk menguji seberapa realistis model ekonomi-politik untuk menjelaskan konsolidasi demokrasi di sejumlah demokrasi Asia. Studi ini bertumpu pada sikap individu warga yang diobservasi lewat survei opini publik nasional di masing-masing negara yang menjadi kasus studi ini, yaitu Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Mongolia, Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal. Pertama, secara umum masyarakat di ketujuh negara tersebut mayoritas punya preferensi terhadap demokrasi dibanding terhadap rezim lainnya, tetapi ada variasi konsolidasi demokrasi di ketujuh negara tersebut. Kedua, Evaluasi atas kondisi ekonomi berpengaruh terhadap evaluasi atas kinerja pemerintah, yang pada gilirannya berpengaruh pada evaluasi atas kinerja demokrasi, dan ujungnya berpengaruh pada konsolidasi demokrasi. Ketiga, model

ekonomi-politik tidak dapat membantu untuk menjelaskan konsolidasi demokrasi di Filipina dan Mongolia, sehingga perlu telaah lebih lanjut untuk dua kasus tersebut. Keempat, efek faktor ekonomi-politik terhadap konsolidasi demokrasi ini secara umum konsisten lepas dari variasi budaya politik, terutama latar belakang tradisi atau peradaban suatu bangsa seperti agama, maupun keragaman sosial-ekonomi seperti pendidikan.

Kata kunci: Asia, konsolidasi demokrasi, model ekonomi-politik, survei opini publik.

DDC: 320.567

Erwin Indradjaja & Fredy B. L. Tobing

FENOMENA NEGARA ISLAM DI IRAQ DAN SURIAH (NIIS): TELAAH HUBUNGAN INTERNASIONAL

Jurnal Ilmu Politik

Volume 22, No.1 Tahun 2017, Hlm. 19-42

Artikel ini membahas fenomena gerakan NIIS di Iraq dan Suriah yang ditelaah dari bidang studi Hubungan Internasional. Fenomena NIIS diawali oleh Al Baghdadi yang mendeklarasikan berdirinya Negara Islam pada 9 April 2013 yang meliputi wilayah Iraq dan

Suriyah. Hal ini tidak lazim dalam politik internasional karena klaim tersebut meliputi Iraq dan Suriyah yang merupakan negara berdaulat. Semula gerakan NIIS berhasil mendapatkan dukungan luas dari negara-negara Arab di Teluk dan negara-negara Islam umumnya. Dengan modal ekonomi yang besar, NIIS dapat dipandang sebagai "kelompok teroris berbaju Islam terkaya" saat itu. Namun alih-alih ingin menerapkan syariah Islam dengan cara yang keras, kaku, brutal dan penuh teror akhirnya gerakan NIIS malah menjadi menurun citranya di kalangan negara-negara pendukungnya. Kompleksitas fenomena NIIS ini dicoba ditelaah dari tiga perspektif Hubungan Internasional: realisme, liberalisme dan konstruktivisme. Tampaknya gerakan NIIS yang beraliran Sunni masih akan tetap eksis, namun nampaknya ada kecenderungan bahwa kekuatan perjuangan mereka akan semakin tergerus seiring makin menurunnya dukungan dunia khususnya negara-negara Islam dan menguatnya kelompok penentang NIIS terutama dari pihak Suriyah dan Iraq – yang sama-sama menganut Syiah – dan AS beserta sekutunya.

Kata kunci: NIIS, Negara Islam, konflik, Syiah, Sunni, Iraq, Suriyah, Al Baghdadi, terorisme, realisme, liberalisme, konstruktivisme.

DDC: 341.23

Irine Hiraswari Gayatri

PENGADOPSIAN UNSCR 1325 DI INDONESIA: BERBAGIPENGALAMAN, PELUANG, DAN TANTANGAN

Jurnal Ilmu Politik

Volume 22, No.1 Tahun 2017, Hlm. 43-55

Sepanjang sejarah, orang di berbagai negara mengalami dampak dengan tingkat yang berbeda yang disebabkan oleh konflik bersenjata. Pada skala global, *United Nations Security Council Resolution* (UNSCR) 1325 yang ditandatangani pada tahun 2000 tentang wanita dalam konflik bersenjata ditandai sebagai langkah penting dalam mengakui peran perempuan dalam proses perdamaian sekaligus signifikasinya dalam memenuhi hak asasi manusia. Sejak itu sifat konflik dunia berubah, substansi tentang perdamaian dan keamanan juga telah berkembang, serta apa yang disebut sebagai keadilan telah berubah. Sampai saat ini, 58 negara telah mengadopsi UNSCR 1325 sebagai bagian dari hukum nasional. Makalah ini melihat proses, strategi dan tantangan dalam perumusan Rencana Aksi Nasional (National Action Plans/NAP dari UNSCR 1325. Makalah ini akan menjelaskan proses dalam mengadopsi UNSCR 1325 di Indonesia dengan mengelaborasi peran aktor dan melihat bagaimana mereka memahami dan mendiskusikan penerapan norma-norma global ke dalam hukum nasional. Pertanyaan utama dari makalah ini adalah "bagaimana ruang-ruang struktural memberikan efek adopsi UNSCR 1325 sebagai rencana aksi nasional di Indonesia?" Ruang Struktural berarti lingkungan politik yang memungkinkan dinamika hubungan antara aktor dan/ atau lembaga-lembaga negara dan non-negara yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan. Diharapkan penelitian ini akan menambah diskusi tentang perempuan dalam perdamaian dan konflik, serta literatur tentang Hubungan Internasional kontemporer.

Kata kunci: Indonesia, Perempuan dalam Konflik Bersenjata, UNSCR 1325

DDC: 324.9598

Daud Ferry Liando

**EVALUASI PILKADA SERENTAK DI
SULAWESI UTARA**

Jurnal Ilmu Politik

Volume 22, No.1 Tahun 2017, Hlm. 57-74

Pilkada secara serentak pada tahun 2015 di Sulawesi Utara belum berhasil sebagaimana tujuan yang diharapkan UU Pilkada. Hal itu disebabkan tingkat partisipasi pemilihnya masih sangat rendah, pembiayaan yang tidak efisien serta pelaksanaan pilkada secara serentak namun belum melahirkan kesamaan periodisasi masa kerja kepala daerah akibat pelantikan tidak dilakukan secara serentak. Penelitian ini hendak menjawab tiga pertanyaan yaitu pertama mengapa tujuan kebijakan pilkada serentak di Sulawesi Utara belum seperti yang diharapkan. Kedua apa saja kendala yang dihadapi sehingga tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Ketiga pembenahan seperti apa yang bisa dilakukan agar tujuan kebijakan pilkada serentak dapat dicapai. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dan untuk mendapatkan data dilakukan FGD dan laporan KPUD dan Bawaslu. Hasil penelitian menyebutkan bahwa tujuan pilkada belum berhasil sebagaimana yang diharapkan karena proses penetapan calon yang tidak melibatkan publik, janji kampanye yang bersifat normatif dan tidak visioner, masalah regulasi, pembiayaan kampanye, pembiayaan kepolisian, serta pembiayaan KPPS.

Kata kunci : pilkada serentak, partisipasi, anggaran, periodisasi

DDC: 305.4869709598

Dwi Windyastuti Budi Hendrarti

**PEREMPUAN DALAM KONTESTASI
POLITIK:REPRESENTASI
DESKRIPTIF PEREMPUAN PADA
PILEG 2014 DAN PILKADA 2015**

Jurnal Ilmu Politik

Volume 22, No.1 Tahun 2017, Hlm. 75-90

Studi ini mencoba untuk mengidentifikasi representasi deskriptif perempuan dalam pemilu legislatif 2014 dan pemilihan kepala daerah 2015. Studi ini penting dilakukan karena kuota 30% perempuan terpenuhi pada pileg 2014, dan perempuan terlibat dalam kontestasi pilkada. Studi ini dilakukan dengan mengambil dokumen di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Banyuwangi, Kediri dan Lamongan tentang keikutsertaan perempuan pada pileg 2014 dan pilkada 2015. Dokumen ditafsir dan dianalisis dengan menggunakan instrumen teori representasi deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi perempuan secara deskriptif tetap penting dikarenakan: 1) kuota perempuan berkontribusi terhadap representasi perempuan karena punya daya paksa penominasian terhadap partai politik; 2) perempuan telah asertif terhadap kekuasaan dengan merebut jabatan-jabatan politik melalui sebuah kontestasi dan memiliki elektabilitas; 3) akseptabilitas pemilih terhadap perempuan caleg menghasilkan banyak wakil perempuan dalam legislatif dan kepala daerah, yang membawa dampak pada terakomodasinya kepentingan perempuan dalam agenda kebijakan pemerintah.

Kata kunci: Akseptabilitas, Asertif, Representasi Deskriptif, Kuota Perempuan

DDC: 352.63

Dede Mariana

**APARATUR SIPIL NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI**

Jurnal Ilmu Politik

Volume 22, No.1 Tahun 2017, Hlm. 91-104

Salah satu buah dari reformasi birokrasi di Indonesia antara lain diterbitkannya undang-undang nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), menggantikan UU No. 8/1974 jo UU No. 43/1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, serta perubahannya. UU ASN ditujukan untuk membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Reformasi birokrasi melalui penerapan kebijakan ASN akan berhasil dengan baik apabila dipenuhi prasyarat sebagai berikut: pertama, pemerintah dan masyarakat membangun tradisi kepemimpinan dalam birokrasi yang mendorong kinerja aparatur yang profesional, inovatif, handal dan bersih. Kedua, pemerintah melaksanakan manajemen ASN yang bersifat meritokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Ketiga, pemerintah dan masyarakat mampu melaksanakan pengawasan terhadap perilaku pejabat dan aparatur negara berdasarkan norma, standar, dan kode etik yang berlaku,

sehingga dapat menjaga integritas aparatur melalui penegakan hukum bagi pejabat yang melanggar kewenangan secara adil dan tegas. Keempat, mengungkit daya kritis masyarakat untuk mengawasi birokrasi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Kata kunci: Reformasi Birokrasi, ASN, Kepemimpinan, Kode Etik, Kinerja Aparatur

DDC: 352.14

I Wayan Gede Suacana

**TANTANGAN DAN PELUANG
OTONOMI DESA DALAM
MEMBANGUN GOVERNANCE DESA
DI BALI**

Jurnal Ilmu Politik

Volume 22, No.1 Tahun 2017, Hlm. 105-123

Timbulnya dualitas administrasi desa (kantor/administratif dan pakraman/adat) di Bali sejalan dengan penerapan produk hukum pemerintah Orde Baru yang mengatur administrasi desa, yaitu UU No. 5/1979. Dualitas pemerintahan desa secara ekonomi dan politik telah mengubah tata kelola pemerintahan desa. Pada masa pemerintah Orde Baru, peranan aparat desa tampak sangat dominan, khususnya untuk memenangkan Golkar dalam setiap pemilu dan penerapan program pembangunan. Dominasi aparat desa dalam sistem desa yang baru menurun sejak pencabutan penerapan UU No. 5/1979 dengan diterapkannya UU No. 22/1999 yang kemudian digantikan dengan UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.

23/2014 tentang Desa. Di era demokrasi dan otonomi luas seperti sekarang, penerapan ide dan format pemerintahan desa diharapkan berkesesuaian dengan kondisi nyata dari sosial budaya masyarakat Bali. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan desa di Bali, khususnya pakraman yang diharapkan menjadi benteng terakhir kelangsungan dari budaya asli Bali.

Kata kunci: otonomi desa, tata kelola pemerintahan desa

DDC : 303.626:363.3

Sandy Nur Ikfal Raharjo

**TINJAUAN BUKU
MELIHAT KEMBALI
PENANGGULANGAN TERORISME
DI INDONESIA MELALUI
DERADIKALISASI**

**Jurnal Ilmu Politik
Volume 22, No.1 Tahun 2017, Hlm. 125-138**

Tulisan ini mengulas buku yang ditulis oleh Muhammad A.S. Hikam tentang penanggulangan terorisme melalui deradikalisasi. Ulasan berfokus pada tiga hal yaitu kenapa deradikalisasi perlu dilakukan, bagaimana deradikalisasi selama ini diimplementasikan, dan bagaimana seharusnya deradikalisasi dilaksanakan di masa yang akan datang. Walaupun ada kritik untuk buku ini tentang obyek deradikalisasi yang terlalu spesifik pada kelompok Islam radikal saja dan evaluasi program yang lebih banyak membahas pada aspek dalam negeri, ulasan ini sepakat dengan sang penulis

bahwa masyarakat sipil Indonesia harus diberdayakan dan dilibatkan secara lebih aktif dalam program deradikalisasi, baik dalam tahap persiapan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

Kata kunci: Deradikalisasi, Masyarakat Sipil Indonesia, Terorisme.
